BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk padat, dan juga merupakan negara yang arus lalu lintas nya cukup padat dan sibuk. Salah satu contohnya di Negara Indonesia tepatnya di Bali, yaitu di Kota Singaraja yang dimana kota ini cukup diminati oleh warga negara asing sebagai tempat mereka berdestinasi atau menetap. Selain itu, Kota Singaraja juga dikenal ssebagai Kota Pendidikan karena menampung pelajar dari berbagai macam daerah yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini yang menyebabkan peningkatan arus lalu lintas di kota Singaraja. Untuk itu, adanya suatu peraturan berlalu lintas yakni Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Alexander, 2019:1).

Sesuai dengan isi Undang – Undang Dasar 1945, yakni Indonesia adalah negara hukum yang harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta mampu menjamin semua kedudukan warga negara secara bersamaan dalam suatu hukum dan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang dimana hal tersebut harus dijalankan dengan tegas dan konsisten.

Saat ini, transportasi berkembang lebih cepat terutama di tempat perekonomian yang berkembang pesat. Banyak orang dari pedesaan pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, lalu lintas yang padat, insiden kecelakaan, pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas, penggunaan alat

transportasi yang tidak sesuai, dan pelanggaran lainnya muncul di kota-kota. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya peraturan berlalu lintas dengan aman, tertib, dan lancar. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran berbagai kegiatan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, disertai dengan menghibahkan hukuman yang kuat terhadap oknum yang melanggar peraturan tersebut.

Handphone (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang memiliki fungsi dasar serupa dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa ke mana saja dan tidak memerlukan sambungan ke jaringan telepon. Telepon genggam/*Handphone* berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk berbicara tanpa batasan jarak. Masyarakat pada zaman sekarang ketika menggunakan telepon genggam terkadang tidak memposisikan dirinya kapan saatnya menggunakan telepon genggam dan kapan saatnya tidak menggunakan telepon genggam seperti contoh menggunakan telepon genggam pada saat berkendara (Putra dkk, 2021: 80).

Penggunaan ponsel pada saat ini memang berperan sangat penting bahkan penggunaan ponsel sudah menjadi kebutuhan pokok dalam berkomunikasi dan mencari sebuah data atau informasi yang diperlukan. Namun, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan dalam penggunaan ponsel dan cenderung menggunakan ponsel pada saat berkendara.

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan dari pengendara yang bermain ponsel saat berlalu lintas tertera pada Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”

Ketidakfokusan dalam berkendara dapat menimbulkan kecelakaan dan tentunya dapat merugikan banyak orang. Selain itu, berkendara sambil bermain ponsel juga dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian. Penyebab meningkatnya rasio angka kematian di kabupaten Buleleng salah satunya adalah berkendara sambil bermain ponsel. Hal ini sangat memprihatinkan karena masyarakat seringkali tidak menyadari perbuatan mereka tersebut sangat berisiko dan dapat mengakibatkan dampak yang fatal bagi pengguna jalan lainnya.

Di tahun 2024 tepatnya pada bulan Februari, adanya suatu kasus seorang pelajar SMA di daerah Seririt Kabupaten Buleleng yang berkendara dengan menggunakan ponsel, akibatnya seorang pelajar tersebut menabrak kendaraan truck bermuatan besar yang sedang parkir di bahu Jalan, sehingga menyebabkan kematian. Hal ini dapat membuktikan bahwa kelalaian berkendara dapat membahayakan diri sendiri dan merugikan orang lain, selain itu kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara, yaitu berkendara dibawah pengaruh alkohol serta mengkonsumsi obat terlarang.

Larangan penggunaan ponsel ketika berkendara dapat mengganggu konsentrasi bagi pengemudi kendaraan bermotor, hal ini bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan berlalulintas kepada setiap orang. Oleh karena itu, pihak kepolisian berkomitmen untuk konsen dalam hal pencegahan penggunaan ponsel saat berkendara dengan memberikan edukasi atau informasi terhadap pengguna kendaraan bermotor akan bahaya penggunaan ponsel di jalan raya. Hal ini dikarenakan penggunaan ponsel di jalan raya merupakan salah satu faktor dari dampak terjadinya kecelakaan di jalan raya. Namun masih banyak

pengguna kendaraan bermotor sering kali masih melakukan pelanggaran terkait penggunaan ponsel saat berkendara, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum dari pengguna kendaraan bahwa dengan menggunakan ponsel saat berkendara dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan orang lain. (Saputra, 2019: 45)

Sudah menjadi kebiasaan manusia pada umumnya mengabaikan sebuah risiko dari suatu perbuatannya. Perlu disadari bahwa, penggunaan ponsel pada saat berkendara itu dapat memecah konsentrasi pada saat berkendara, juga dapat mempengaruhi ke stabilan dalam mengendalikan kendaraan pun ikut berkurang yang kemungkinan besar akan menimbulkan kecelakaan. Masalah seperti ini memanglah kerap terjadi dikarenakan kasus ketidak tertiban dalam berkendara ini merupakan suatu kasus yang dilakukan secara berulang-ulang hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus pelanggaran berlalu lintas terkhusus nya di Kabupaten Buleleng.

Adanya larangan berkendara tersebut tertara dalam Peraturan Undang - Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang lebih jelasnya di Pasal 283 Juncto Pasal 106 Ayat (1) (Monika, 2024:6). Mengenai pelanggaran di Indonesia kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif, dan penegakan hukum lalu lintas bidang represif.

Penegakan hukum preventif ini meliputi suatu kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya

tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan penegakan hukum bidang represif ini meliputi suatu penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang (Arsanu dkk, 2022:90).

Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi aparat kepolisian khususnya di Polres Buleleng, karena masih banyak masyarakat yang sering melakukan aktivitas tersebut pada saat berkendara. Sesuai Pasal 283 yang tertuang, yaitu terkait ketidaktertiban dalam berkendara. Peranan pihak aparat kepolisian yang telah mengambil langkah konkret dalam menerapkan pasal ini agar berjalan sesuai dengan kebijakan peraturan berkendara terkhususnya di wilayah Kabupaten Buleleng.

Kembali kita lihat bahwa pelanggaran - pelanggaran seperti ini banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas, yakni bermain gawai, pengaruh minuman beralkohol, merokok dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, terdapat pasal yang mengatur terkait larangan rokok saat berkendara, meskipun hal ini dianggap sepele namun hal tersebut harus tetap diperhatikan. Larangan penggunaan ponsel pada saat berkendara terutama bagi sepeda motor yang yang mengakibatkan gangguan konsentrasi berupa bermain ponsel pada saat berkendara tertuang dalam pada Pasal 283 yang mengatur tentang aturan berkendara di jalan raya yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah”

Secara umum, pengendara kendaraan bermotor sering kali menggunakan ponsel saat berkendara, yang dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi. Jika saat berkendara terjadi kehilangan fokus dan mengakibatkan kelalaian, sehingga menyebabkan kecelakaan dengan menabrak pengendara lain, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 106 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan raya diwajibkan untuk mengemudikan kendaraannya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi (Novita dkk, 2022: 72).

Namun tidak dapat dipungkiri kembali, bahwasannya masyarakat pada zaman sekarang tidak memikirkan keselamatan orang lain pada saat berkendara yang pastinya mereka berkendara sesuai dengan apa keinginan mereka tanpa berfikir apakah tindakan mereka tersebut dapat membahayakan orang lain yang sudah berkendara dengan hati-hati. Maka dalam hal ini sangat penting untuk dibahas karena kasus ini adalah sebuah kasus yang dimana kejadiannya dilakukan secara berulang ulang terjadi. Peranan pihak kepolisian terkhususnya Polres Buleleng sudah sangat baik penjalan Pasal 283 Juncto Pasal 106 Ayat (1), serta kebanyakan masyarakat tidak adanya rasa kesadaran diri untuk berhenti membahayakan keselamatan orang lain selagi berkendara di jalan karena pada hakikatnya nyawa itu tiada harganya dibanding dengan uang. Meski Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi.

Ketidaktertiban dalam berkendara sering sekali kita jumpai di jalan raya

terkhususnya di Kabupaten Buleleng yang dimana banyak sekali kasus kasus pelanggaran berlalu lintas yang dimana ini bukanlah sesuatu yang hal yang baik. Kondisi ini bukanlah hal yang baik karena masih pada saat ini pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi dibelakangan ini. Tidak hanya itu, pengendara yang melakukan bukan hanya masyarakat yang berumur diatas 30 tahun, namun ada mahasiswa, pelajar, bahkan yang lebih parahnya lagi anak SD pun ada yang melanggar juga. Dari tahun 2022 sampai tahun 2024 pelanggaran lalu lintas meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Kasus ketidaktertiban dalam berkendara sudah banyak sekali ditemui dijalan raya bahkan ada kasus yang dimana ada pengendara yang bermain ponsel sambil membawa sepeda motor yang mengalami kecelakaan. Hal ini dapat dilihat bahwa ketidaktertiban berkendara itu sangat banyak sekali terjadi terkhusus nya di Kabupaten Buleleng dan hal ini bukanlah hal yang baru kita jumpai di jalan raya karena hal seperti ini sudah sangat lumrah terjadi.

Masyarakat Kabupaten Buleleng sering melakukan pelanggaran aturan berlalu lintas. Karena Buleleng adalah kota pendidikan, banyak orang yang pergi ke Buleleng untuk sekolah, baik dari daerah lain di Bali ataupun dari luar Bali. Akibatnya, jalan- jalan di Buleleng sangat padat dan banyak pelanggaran aturan berlalu lintas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendarai alat transportasi mereka, tidak peduli apakah mereka memiliki surat-surat atau tidak. Pelanggaran rambu lalu lintas termasuk insiden yang sering terjadi di Buleleng. Tidak hanya itu, rata rata usia para pelanggar itu dimulai dari umur 17-70 tahun dan total dari pelanggarannya yaitu sebanyak 3,655 orang.

Anak-anak zaman sekarang seringkali berkendara tanpa memperhatikan

keselamatannya, begitu pula dengan orang yang berusia diatas 50 tahun ini merupakan sebuah fenomena yang seringkali dijumpai di kawasan jalan raya. Namun, pihak aparat kepolisian telah menggunakan segala upaya agar meminimalisir terjadinya sebuah pelanggaran yakni dengan melakukan sebuah patroli yang bernama *Blue Light Patrol* yang dimana patroli ini bertujuan untuk mencegahnya terjadinya sebuah potensi gangguan pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng khususnya. Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah, dikarenakan hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya perilaku tidak taat terhadap ketentuan lalu lintas di jalan.

Pada tahun 2024, pihak aparat kepolisian juga menggelar Operasi Zebra Agung 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kedisiplinan masyarakat disaat sedang berlalu lintas. Operasi Zebra Agung ini juga ditegaskan akan mengedepankan pendekatan secara edukatif, persuasif serta humanis yang bertujuan agar menurunnya angka pelanggaran berlalu lintas, kecelakaan, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi Zebra Agung ini juga menargetkan pengendara yang menyalahi aturan berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti penggunaan ponsel pada saat berkendara, tidak mengenakan helm SNI, serta mengendarai kendaraan dalam keadaan pengaruh alkohol. Ini dilakukan dengan tujuan agar berkurangnya masyarakat di kabupaten Buleleng agar lebih *aware* dengan keselamatan berkendara dalam berlalu lintas agar berkurangnya rasio angka pelanggaran berlalu lintas di Kabupaten Buleleng serta rasio angka kematian akibat kecelakaan.

Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, karena berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan setiap pemakai jalan harus menaati Undang-Undang dan ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas dan angkutan jalan. Salah satu dasar kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah kebiasaan. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi sehingga kepatuhan akan kaidah tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan (Junef, 2016: 55).

Kesadaran berkendara merupakan aspek penting dalam menciptakan keselamatan di jalan raya. Kesadaran ini merujuk pada pemahaman dan komitmen para pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas, menghindari perilaku berbahaya, dan senantiasa waspada terhadap potensi risiko kecelakaan. Pengendara yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa aktivitas berkendara mengandung risiko terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Mereka akan menyadari potensi bahaya yang mungkin timbul dari perilaku mengemudi yang buruk, seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan berlebihan, berkendara dalam kondisi lelah atau di bawah pengaruh zat terlarang.

Kesadaran berkendara mendorong pengendara untuk menghindari perilaku berbahaya di jalan raya. Hal ini mencakup kepatuhan pada rambu-rambu lalu lintas,

menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, dan tidak menggunakan ponsel saat mengemudi. Pengendara yang sadar akan menghindari berkendara dalam kondisi tidak memungkinkan, seperti ketika mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Kesadaran berkendara juga melibatkan kewaspadaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan kemampuan untuk mengantisipasi potensi bahaya. Pengendara yang sadar akan selalu memperhatikan situasi lalu lintas, memindai area sekitar untuk mengidentifikasi risiko potensial, dan siap untuk bereaksi dengan tepat jika diperlukan.

Pengendara yang memiliki kesadaran tinggi akan menunjukkan empati dan penghormatan kepada pengguna jalan lainnya, seperti pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengemudi kendaraan lain. Mereka akan mematuhi aturan lalu lintas, memberikan prioritas kepada pejalan kaki, dan menghindari perilaku mengemudi yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Kesadaran berkendara juga mencerminkan tanggung jawab pribadi untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Pengendara yang sadar akan menyadari bahwa tindakan mereka dapat berdampak pada keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, sehingga mereka akan bertindak dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan. Dengan meningkatkan kesadaran berkendara, kita dapat menciptakan budaya keselamatan di jalan raya yang lebih kuat dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material. Kesadaran ini harus terus dipupuk melalui edukasi, kampanye keselamatan, dan penegakan hukum yang konsisten (Barus dkk, 2024:153).

Kesadaran masyarakat masih sangat minim terkait pentingnya rasa

keamanan saat berkendara (*safety riding*) masyarakat pada saat berkendara kebanyakan menggunakan ego nya saat berkendara dan mereka merasa kalau cara mereka berkendara itu sudah benar. Berikut merupakan data yang di dapat dari SATLANTAS Polres Buleleng terkait dengan pelanggaran berlalu lintas di wilayah Polres Buleleng selama kurun waktu 4 tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Sanksi Pelanggaran Berlalu Lintas Secara Umum

NO	TAHUN	JUMLAH SANKSI PELANGGARAN HUKUM BERLALU LINTAS		TOTAL
		Tilang	Teguran	
				16,368
1	2021	3,655	12,713	10,221
2	2022	5,230	4,991	12,274
3	2023	3,000	9,274	29,068
4	2024	1,552	27,546	16,368

Sumber: *Data SATLANTAS Polres Kabupaten Buleleng*

Tabel yang tersaji di atas memperlihatkan adanya peningkatan kasus pelanggaran aturan berlalu lintas di Kabupaten Buleleng dalam beberapa tahun terakhir. Kasus pelanggaran aturan berlalu lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng mengalami beberapa peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tercatat 16,368 kasus, namun pada tahun 2022 data kasus ini terjadi penurunan akibat adanya Virus Corona menjadi 10,221 kasus, setelah itu kembali terjadi peningkatan data kasus pada tahun 2023 menjadi 29,068 kasus, dari Januari hingga Oktober. Penanganan kasus tersebut dilakukannya dengan diberikannya sanksi tilang dan teguran di lokasi kejadian langsung (TKP) bagi pengendara yang terduga melakukan pelanggaran.

Terdapat banyaknya insiden pelanggaran aturan berlalu lintas yang tercatat di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa saat masyarakat berkendara tanpa

mentaati peraturan lalu lintas. Sebagian orang mungkin tidak menyadari bahwa melanggar aturan berlalu lintas dapat memiliki konsekuensi hukum dan mengancam keselamatan mereka sendiri dan orang lain di jalan. Selain itu, aparat kepolisian merupakan salah satu keberhasilan penegakan hukum di Kabupaten Buleleng. Adapun jumlah kasus pelanggaran berlalu lintas dengan menggunakan telepon genggam saat berkendara di wilayah Polres Buleleng dalam kurun waktu selama 4 tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Data Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam

NO	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2021	48
2	2022	9
3	2023	0
4	2024	5
	Total	62

Sumber: *Data SATLANTAS Polres Kabupaten Buleleng*

Pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan telepon genggam dari tahun 2021 sebanyak 48 kasus, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan yang dimana kasus penggunaan telepon genggam saat berkendara ini hanya berkisar sebanyak 9 kasus saja. Pada tahun 2023 tidak teridentifikasinya pelanggaran penggunaan telepon genggam saat berkendara, Serta pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang dimana pada tahun tersebut kasus pelanggaran nya hanya sebanyak 5 kasus penggunaan telepon genggam saat berkendara. Sedangkan pada tahun 2025 ini mengalami kenaikan kasus sebanyak 1 kasus yang dimana kasus penggunaan telepon genggam terjadi pada bulan April.

Penegakan hukum ini seharusnya membuat efek jera bagi pelanggar, sehingga lebih bisa untuk berhati-hati dan tidak melanggar lalu lintas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait pelanggaran aturan berlalu lintas, dengan perhatian khusus terhadap ketidaktertiban dalam berkendara di wilayah hukum Polres Buleleng dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT DENGAN KETIDAKTERTIBAN BERKENDARA AKIBAT PENGGUNAAN TELEPON GENGAM (Studi Kasus Satlantas Polres Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketidaktertiban dalam berlalu lintas di Kabupaten Buleleng ini masih banyak terjadi dikarenakan hal tersebut dapat mengganggu pengendara lainnya serta dapat menimbulkan masalah bagi pihak berwenang dalam penegakkan suatu proses hukum.
2. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban dalam berkendara dan fokus saat berkendara tanpa menggunakan handphone saat berkendara dan mengabaikan keselamatan dalam berkendara.
3. Peran penegak hukum dalam menjalankan upaya implementasi hukum ketidaktertiban dalam berkendara dengan menggunakan telepon genggam saat berkendara yang mengganggu konsentrasi saat berkendara khususnya wilayah hukum Polres Buleleng, belum dilaksanakan secara optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Suatu permasalahan tentunya berpedoman pada suatu batasan, agar lebih terorganisir sehingga dapat menjamin pembahasan masalah untuk tetap fokus pada tujuan utama dari batasan tersebut. Dengan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggar peraturan lalu lintas di kawasan Kabupaten Buleleng, pengkaji dapat mempersempit ruang lingkup permasalahan berdasarkan kajian ini. Dimana pelanggar aturan berlalu lintas khususnya terkait ketidaktertiban dalam berlalu lintas masih sering kita temukan di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang di atas, teridentifikasi suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas di jalan raya?
2. Apa faktor - faktor yang menjadi hambatan bagi pihak aparat kepolisian Satlantas Polres Buleleng dalam menegakkan peraturan lalu lintas terkait penggunaan telepon genggam saat berkendara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini terkhususnya mengarah pada bagaimana implementasi implementasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang ketidaktertiban dalam berkendara dengan menggunakan telepon genggam selama berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi penuh dalam berkendara di Kabupaten Buleleng yang dimana tercantum di dalam paragraf di bawah ini sebagai berikut:

A. Tujuan Umum

Untuk memahami bagaimana implementasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Ketidaktertiban berkendara dengan menggunakan telepon genggam selama berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi penuh selama berkendara dapat diterapkan di Polres Kabupaten Buleleng.

B. Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi serta mengkaji implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang ketidaktertiban dalam berkendara dengan menggunakan telepon genggam selama berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi penuh selama berkendara di Kabupaten Buleleng; dan
- b. Mengevaluasi dan mengkaji penegakan hukum yang efektif terkait dengan ketidaktertiban dalam berkendara dalam melaksanakan peraturan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan atau kontribusi ide dan pengetahuan terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan terlebihnya bisa mendapatkan banyak sekali referensi terkait dengan ketidaktertiban dalam berkendara di Kabupaten Buleleng.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian Sejenis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambahkan pemahaman penelitian sejenis terkait penerapan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait ketidaktertiban dalam berkendara dengan menggunakan telepon genggam selama berkendara di Kabupaten Buleleng

2. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai pengendara yang melakukan ketidaktertiban dalam berkendara terkhususnya di Kabupaten Buleleng merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mengetahui bagaimana pengimplementasian pasal Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang ketidaktertiban dalam berkendara dengan menggunakan telepon genggam selama berkendara di Kabupaten Buleleng.

3. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan acuan sebagai referensi praktis untuk pelaksanaan dan penilaian efektivitas penyelenggaraan pemerintah yang sudah berlangsung sejauh ini. Terutama, dalam hal konteks penegakan hukum terhadap ketidaktertiban dalam berkendara, terkhususnya terhadap ketidak fokusan dalam berkendara dalam hal menggunakan telepon genggam selama berkendara di Wilayah Polres Kabupaten Buleleng.